



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Kehutanan dan untuk melakukan perubahan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;

Mengingat: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan meliputi penerimaan dari :
- a. Dana Reboisasi (DR);
 - b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 - c. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IIUPHHK-HA);
 - d. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dengan Sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB);
 - e. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IIUPHHBK);

f. Iuran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. Iuran Izin Pemanfaatan Kawasan;
- g. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IIUPHHK-RE) pada Hutan Produksi;
- h. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi (IIUPJL);
- i. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IIUPHHK-HTR), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Kemasyarakatan (IIUPHHK-HKm), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Desa (IIUPHHK-HD);
- j. Ganti Rugi Tegakan;
- k. Penggantian Nilai Tegakan;
- l. Transaksi kegiatan penyerapan dan atau penyimpanan karbon dari kawasan hutan;
- m. Hasil Silvopastural Sistem;
- n. Hasil Silvofishery Sistem;
- o. Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH);
- p. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam;
- q. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- r. Denda Administratif bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- s. Hasil lelang kayu temuan, dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang;
- t. Iuran Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dalam Kawasan Hutan Konservasi;
- u. Iuran Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) dalam Kawasan Hutan Konservasi;
- v. Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) dalam Kawasan Hutan Konservasi;
- w. Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air (PUPEA) dalam Kawasan Hutan Konservasi;

x. Kegiatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- x. Kegiatan Perijinan Dibidang Perbenihan;
 - y. Sertifikasi Benih;
 - z. Iuran Pengumpulan/Pengunduhan Benih dan Anakan;
 - aa. Jasa Laboratorium;
 - bb. Produk Samping Hasil Penelitian;
 - cc. Jasa Perpustakaan;
 - dd. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana yang terkait dengan tugas dan fungsi; dan
 - ee. Jasa Lainnya.
- (2) Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf p dibagi dalam Rayon I, Rayon II, dan Rayon III.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian rayonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Pasal 3

Menteri Kehutanan menetapkan harga patokan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini berdasarkan harga jual rata-rata:

- a. Hasil hutan kayu dari hutan alam di Tempat Pengumpulan;
- b. Hasil hutan kayu dari hutan tanaman berdasarkan nilai rata-rata tegakan di hutan;
- c. Hasil hutan bukan kayu di Tempat Pengumpulan;

d. Tumbuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. Tumbuhan atau satwa liar di dalam negeri atau di luar negeri;
- e. Benih tanaman hutan di Tempat Sumber Benih.

Pasal 4

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kehutanan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada kegiatan tertentu dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kegiatan penelitian yang berada di kawasan pelestarian alam dan taman buru, serta kawasan suaka alam bagi mahasiswa/pelajar Indonesia;
 - b. Kegiatan sosial dan religi yang dilaksanakan di kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam; dan
 - c. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang diperuntukan bagi bantuan terhadap bencana alam.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan kegiatan tertentu untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kehutanan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian kehutanan, wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767), sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Kehutanan dan untuk melakukan perubahan jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Hal tersebut sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687), perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Tempat Pengumpulan" adalah tempat untuk pengumpulan hasil penebangan disekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Tempat Pengumpulan" adalah tempat untuk pengumpulan hasil pemanenan disekitar tempat pemanenan yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Tempat Sumber Benih" adalah tempat asal sumber benih baik dari dalam negeri atau luar negeri.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN KEHUTANAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|--------------------|-----------|
| I. Dana Reboisasi (DR). Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Hutan Alam. 1. Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu) dan Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua). a. Kayu yang berasal dari wilayah Sumatera dan Sulawesi. 1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu). a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS); b) Diameter > 49 cm (KB). 2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua). a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS); b) Diameter > 49 cm (KB). b. Kayu yang berasal dari wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku. 1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu). a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS); b) Diameter > 49 cm (KB). 2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua). | | |
| | per m ³ | USD 14.00 |
| | per m ³ | USD 14.50 |
| | per m ³ | USD 12.00 |
| | per m ³ | USD 12.50 |
| | per m ³ | USD 16.00 |
| | per m ³ | USD 16.50 |

a) Diameter . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|--------------------|-----------|
| a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS); | per m ³ | USD 13.00 |
| b) Diameter > 49 cm (KB). | per m ³ | USD 13.50 |
| c. Kayu yang berasal dari wilayah Papua, dan Nusa Tenggara. | | |
| 1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu). | | |
| a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS); | per m ³ | USD 13.00 |
| b) Diameter > 49 cm (KB). | per m ³ | USD 13.50 |
| 2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua). | | |
| a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS); | per m ³ | USD 10.50 |
| b) Diameter > 49 cm (KB). | per m ³ | USD 11.00 |
| 2. Kelompok Indah (tanpa batasan diameter): | | |
| a. Kelompok Indah Satu. | | |
| 1) Eboni Bergaris (<i>Diaspyros celebica Bakh</i>); | per ton | USD 20.00 |
| 2) Eboni Hitam (<i>Diaspyros rumphii Bakh</i>); | per ton | USD 20.00 |
| 3) Eboni (<i>Diaspyros spp</i>). | per ton | USD 20.00 |
| b. Kelompok Indah Dua. | per m ³ | USD 18.00 |
| 3. Jenis kayu lainnya yang berlaku di seluruh Indonesia. | | |
| a. Kayu Mentaos (<i>Wrightia javanica</i>); | per m ³ | USD 18.00 |
| b. Kayu Kisereh (<i>Cinnamomum parthenoxylon</i>); | per m ³ | USD 18.00 |
| c. Kayu Perupuk (<i>Lophopetalum spp</i>); | per m ³ | USD 18.00 |
| d. Kayu Giam (<i>Cotylelobium spp</i>); | per m ³ | USD 18.00 |
| e. Kayu Balangeran (<i>Shorea balangeran</i>); | per m ³ | USD 18.00 |
| f. Kayu Kulim (<i>Scorodocarpus borneensis</i>); | per m ³ | USD 18.00 |
| g. Kayu Merbau (<i>Intsia spp</i>); | per m ³ | USD 16.00 |
| h. Kayu Cendana; | per ton | USD 18.00 |

i. Kayu . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|--------------------|---------------------|
| i. Kayu Kuning. | per ton | USD 18.00 |
| 4. Kayu Bulat Kecil (KBK) diameter < 30 cm. | per m ³ | USD 4.00 |
| 5. Kayu Bulat Kecil (Kecuali sortimen jenis lainnya di bawah ini). | | |
| a. Kayu bakar; | per stapple meter | USD 2.00 |
| b. Cerucuk; | per batang | USD 0.05 |
| c. Tiang Jermal; | per batang | USD 0.05 |
| d. Tunggak jati alam/atau tunggak Ulin. | per ton | USD 2.00 |
| II. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). | | |
| A. Kayu: | | |
| 1. Kayu Bulat dari Hutan Alam. | | |
| Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu) dan Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua). | | |
| a. Kayu yang berasal dari Wilayah Sumatera dan Sulawesi. | | |
| 1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu). | | |
| a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS); | per m ³ | 10% x harga patokan |
| b) Diameter > 49 cm (KB). | per m ³ | 10% x harga patokan |
| 2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua). | | |
| a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS); | per m ³ | 10% x harga patokan |
| c) Diameter > 49 cm (KB). | per m ³ | 10% x harga patokan |
| b. Kayu yang berasal dari wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku. | | |
| 1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu). | | |
| a) Diameter 30 cm s/d 49 cm; | per m ³ | 10% x harga patokan |

b) Diameter . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|--------------------|---------------------|
| b) Diameter > 49 cm. | per m ³ | 10% x harga patokan |
| 2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua). | | |
| a) Diameter 30 cm s/d 49 cm; | per m ³ | 10% x harga patokan |
| b) Diameter > 49 cm. | per m ³ | 10% x harga patokan |
| c. Kayu yang berasal dari wilayah Papua, Nusa Tenggara. | | |
| 1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu). | | |
| a) Diameter 30 cm s/d 49 cm; | per m ³ | 10% x harga patokan |
| b) Diameter > 49 cm. | per m ³ | 10% x harga patokan |
| 2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua). | | |
| a) Diameter 30 cm s/d 49 cm; | per m ³ | 10% x harga patokan |
| b) Diameter > 49 cm. | per m ³ | 10% x harga patokan |
| d. Kelompok Indah (tanpa batasan diameter). | | |
| 1) Kelompok Indah Satu. | | |
| a) Eboni Bergaris (<i>Diaspyros celebica Bakh</i>); | per ton | 10% x harga patokan |
| b) Eboni Hitam (<i>Diaspyros rumphii Bakh</i>); | per ton | 10% x harga patokan |
| c) Eboni (<i>Diaspyros spp</i>). | per ton | 10% x harga patokan |
| 2) Kelompok Indah Dua. | per m ³ | 10% x harga patokan |
| e. Jenis kayu lainnya yang berlaku di seluruh Indonesia. | | |
| 1) Kayu Mentaos (<i>Wrightia javanica</i>); | per m ³ | 10% x harga patokan |
| 2) Kayu Kisereh (<i>Cinnamomum parthenoxylon</i>); | per m ³ | 10% x harga patokan |
| 3) Kayu Giam (<i>Cotylelobium spp</i>); | per m ³ | 10% x harga patokan |
| 4) Kayu Balangeran (<i>Shorea balangeran</i>); | per m ³ | 10% x harga patokan |

5) Kayu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|--------------------|---------------------|
| 5) Kayu Perupuk (<i>Lophopetalum spp</i>); | per m ³ | 10% x harga patokan |
| 6) Kayu Kulim (<i>Scorodocarpus borneensis</i>); | per m ³ | 10% x harga patokan |
| 7) Kayu Merbau (<i>Intsia spp</i>); | per m ³ | 10% x harga patokan |
| 8) Kayu Cendana (<i>Santalum album</i>); | per ton | 10% x harga patokan |
| 9) Kayu Kuning. | per ton | 10% x harga patokan |
| f. Kayu Bulat Kecil (KBK). | per m ³ | 10% x harga patokan |
| g. Kayu Bulat Kecil (Kecuali sortimen jenis lainnya di bawah ini). | | |
| 1) Kayu Bakar; | per stappel meter | 10% x harga patokan |
| 2) Cerucuk; | per batang | 10% x harga patokan |
| 3) Tiang Jermal; | per batang | 10% x harga patokan |
| 4) Tunggak Jati dan/atau tunggak Ulin. | per ton | 10% x harga patokan |
| 2. Kayu bulat dari Hutan Tanaman Industri (HTI): | | |
| a. Pinus/Tusam; | per m ³ | 6% x harga patokan |
| b. <i>Acasia</i> ; | per m ³ | 6% x harga patokan |
| c. Balsa; | per m ³ | 6% x harga patokan |
| d. Ekaliptus; | per m ³ | 6% x harga patokan |
| e. <i>Gmelina arborea</i> ; | per m ³ | 6% x harga patokan |
| f. Karet; | per m ³ | 6% x harga patokan |
| g. Sengon; | per m ³ | 6% x harga patokan |
| h. Jenis kayu bulat lainnya dari Hutan Tanaman. | per m ³ | 6% x harga patokan |
| 3. Kayu Perum Perhutani dan Daerah Istimewa Yogyakarta: | | |
| a. Kayu Bulat Jati dan Sonokeling. | | |
| 1) Kayu Bulat diameter > 30 cm; | per m ³ | 6% x harga patokan |

2) Kayu . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 6 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|--------------------|--------------------|
| 2) Kayu Bulat Kecil. | per m ³ | 6% x harga patokan |
| b. Kayu Bulat Rimba Indah (Sonobrit, Mahoni). | | |
| 1) Kayu Bulat diameter > 30 cm; | per m ³ | 6% x harga patokan |
| 2) Kayu Bulat Kecil. | per m ³ | 6% x harga patokan |
| c. Kayu Bulat jenis Pinus, Damar, Sengon, Balsa, Eucalyphthus, Jabon, Acasia Mangium, Karet dan <i>Gmelina arborea</i> . | | |
| 1) Kayu Bulat diameter > 30 cm; | per m ³ | 6% x harga patokan |
| 2) Kayu Bulat Kecil. | per m ³ | 6% x harga patokan |
| d. Kayu Bulat Rimba Campuran selain butir c. | | |
| 1) Kayu Bulat diameter > 30 cm; | per m ³ | 6% x harga patokan |
| 2) Kayu Bulat Kecil. | per m ³ | 6% x harga patokan |
| e. Rasamala (<i>Altingia excelsa Naronha</i>). | per m ³ | 6% x harga patokan |
| 4. Kayu Bulat Diameter Sedang (Jenis sesuai dengan Kayu Bulat). | per m ³ | 6% x harga patokan |
| B. Bukan Kayu dari Hutan Negara. | | |
| 1. Rotan. | | |
| a. Kelompok Rotan Pulut. | | |
| 1) Rotan Pulut Merah; | per ton | 6% x harga patokan |
| 2) Rotan Pulut Putih; | per ton | 6% x harga patokan |
| 3) Rotan Lilin; | per ton | 6% x harga patokan |
| 4) Rotan Lacak; | per ton | 6% x harga patokan |
| 5) Rotan Datuk. | per ton | 6% x harga patokan |
| b. Kelompok Rotan Sega. | | |
| 1) Rotan Sega (Taman); | per ton | 6% x harga patokan |
| 2) Rotan Sega Air (Ronti); | per ton | 6% x harga patokan |
| 3) Rotan Sega Badak; | per ton | 6% x harga patokan |
| 4) Rotan Irit/Jahab. | per ton | 6% x harga patokan |
| c. Kelompok Rotan Lambang. | | |
| 1) Rotan Lambang; | per ton | 6% x harga patokan |

2) Rotan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|-------------------------|--------------------|
| 2) Rotan Anduru; | per ton | 6% x harga patokan |
| 3) Rotan Lita; | per ton | 6% x harga patokan |
| 4) Rotan Sabutan; | per ton | 6% x harga patokan |
| 5) Rotan Ampar Tikar; | per ton | 6% x harga patokan |
| 6) Rotan Terumpu; | per ton | 6% x harga patokan |
| 7) Rotan Jermasin. | per ton | 6% x harga patokan |
| d. Kelompok Rotan Tohiti (Tohiti dan Telang). | | |
| 1) Diameter ≤ 25 mm; | per ton | 6% x harga patokan |
| 2) Diameter > 25 mm. | per ton | 6% x harga patokan |
| e. Kelompok Rotan Manau. | | |
| a) Rotan Manau; | per batang | 6% x harga patokan |
| b) Rotan Manau Tikus; | per batang | 6% x harga patokan |
| c) Rotan Riang; | per batang | 6% x harga patokan |
| d) Rotan Manau Padi. | per batang | 6% x harga patokan |
| f. Kelompok Rotan Semambu. | | |
| 1) Rotan Semambu; | per batang | 6% x harga patokan |
| 2) Rotan Tabu-tabu; | per batang | 6% x harga patokan |
| 3) Rotan Wilatung; | per batang | 6% x harga patokan |
| 4) Rotan Nawi; | per batang | 6% x harga patokan |
| 5) Rotan Dahan. | per batang | 6% x harga patokan |
| g. Kelompok Rotan Jenis Lainnya (<i>yang tidak tercantum di atas</i>). | per ton atau per batang | 6% x harga patokan |
| 2. Getah Kayu Hutan. | | |
| a. Getah Jelutung; | per ton | 6% x harga patokan |
| b. Getah Ketiau; | per ton | 6% x harga patokan |
| c. Getah Karet hutan; | per ton | 6% x harga patokan |
| d. Getah Hangkang; | per ton | 6% x harga patokan |
| e. Getah Jernang; | per ton | 6% x harga patokan |
| f. Getah Sundik; | per ton | 6% x harga patokan |
| g. Getah Pinus. | per ton | 6% x harga patokan |

3. Damar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|---------|--------------------|
| 3. Damar. | | |
| a. Damar Mata Kucing; | per ton | 6% x harga patokan |
| b. Damar Batu; | per ton | 6% x harga patokan |
| c. Damar Kopal; | per ton | 6% x harga patokan |
| d. Damar Pilau; | per ton | 6% x harga patokan |
| e. Damar Rasak; | per ton | 6% x harga patokan |
| f. Damar Daging; | per ton | 6% x harga patokan |
| g. Damar Gaharu; | per kg | 6% x harga patokan |
| h. Sheetlac; | per ton | 6% x harga patokan |
| i. Gubal Gaharu; | per kg | 6% x harga patokan |
| j. Kemendangan; | per kg | 6% x harga patokan |
| k. Kemenyan; | per ton | 6% x harga patokan |
| l. Gambir. | per ton | 6% x harga patokan |
| 4. Biji-bijian. | | |
| a. Biji Tengkawang; | per ton | 6% x harga patokan |
| b. Biji Kemiri; | per ton | 6% x harga patokan |
| c. Kenari; | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Biga; | per ton | 6% x harga patokan |
| e. Asam; | per ton | 6% x harga patokan |
| f. Biji-bijian Jenis lainnya yang tidak tercantum di atas. | per ton | 6% x harga patokan |
| 5. Daun-daunan dan akar-akaran. | | |
| a. Daun Kayu Putih; | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Daun Cengkeh; | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Akar Sereh; | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Akar Lawang; | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Akar Wangi. | per kg | 6% x harga patokan |
| 6. Biji Kopi yang berasal dari kawasan hutan. | per kg | 6% x harga patokan |

7. Kulit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|------------|--------------------|
| 7. Kulit Kayu. | | |
| a. <i>Acasia</i> ; | per ton | 6% x harga patokan |
| b. Bakau; | per ton | 6% x harga patokan |
| c. Kalapari; | per ton | 6% x harga patokan |
| d. Gelam; | per ton | 6% x harga patokan |
| e. Kayu Salaro; | per ton | 6% x harga patokan |
| f. Kayu Laut; | per ton | 6% x harga patokan |
| g. Kayu Lawang; | per ton | 6% x harga patokan |
| h. Kayu Kusarang; | per ton | 6% x harga patokan |
| i. Kayu Manis; | per ton | 6% x harga patokan |
| j. Masoi; | per ton | 6% x harga patokan |
| k. Nyirih; | per ton | 6% x harga patokan |
| l. Tangir; | per ton | 6% x harga patokan |
| m. Tinggi; | per ton | 6% x harga patokan |
| n. Tarok; | per ton | 6% x harga patokan |
| o. Soga; | per ton | 6% x harga patokan |
| p. Suka; | per ton | 6% x harga patokan |
| q. Pulosantan; | per ton | 6% x harga patokan |
| r. Gemor / Salampati; | per ton | 6% x harga patokan |
| s. Medang Keladi; | per ton | 6% x harga patokan |
| t. Kulit kayu hutan jenis lainnya yang tidak tercantum di atas. | per ton | 6% x harga patokan |
| 8. Bambu Hutan. | | |
| a. Bambu Apus; | per batang | 6% x harga patokan |
| b. Bambu Petung; | per batang | 6% x harga patokan |
| c. Bambu Milah; | per batang | 6% x harga patokan |
| d. Bambu Glontang. | per batang | 6% x harga patokan |
| 9. Tikar. | | |
| a. Agel; | per lembar | 6% x harga patokan |
| b. Kolosoa; | per lembar | 6% x harga patokan |
| c. Pandan. | per lembar | 6% x harga patokan |

10. Atap . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 10 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|-------------------------------|---------------------|
| 10. Atap. | | |
| a. Atap Nipah/Kajang; | per lembar | 6% x harga patokan |
| b. Atap Rumbia; | per lembar | 6% x harga patokan |
| c. Atap Sirap | per keping | 6% x harga patokan |
| 11. Buah-buahan dan umbi-umbian yang berasal dari hutan negara. | per ton | 6% x harga patokan |
| 12. Lain-lain. | | |
| a. Nibung Bulat; | per batang | 6% x harga patokan |
| b. Lilin Tawon; | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Madu; | per liter | 6% x harga patokan |
| d. Sagu; | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Nipah; | | |
| 1) Nira. | per liter | 6% x harga patokan |
| 2) Gula. | per kg | 6% x harga patokan |
| f. Ijuk. | per ton | 6% x harga patokan |
| g. Ketak; | per ton | 10% x harga patokan |
| h. Batang Kelapa Sawit | per m ³ | 10% x harga patokan |
| III. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA). | | |
| A. Wilayah Sumatera, Sulawesi dan Papua. | per ijin per hektar per tahun | Rp. 3.750,00 |
| B. Wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku. | per ijin per hektar per tahun | Rp. 5.000,00 |
| C. Wilayah Nusa Tenggara. | per ijin per hektar per tahun | Rp. 2.000,00 |
| IV. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dengan Sistem Permudaan Buatan (THPB). | per ijin per hektar per tahun | Rp. 250,00 |

V. Iuran . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 11 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-------------------------------|------------------------------|
| V. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IIUPHHBK). | | |
| A. Hutan Alam. | per ijin per hektar per tahun | Rp. 500,00 |
| B. Hutan Tanaman. | per ijin per hektar per tahun | Rp. 250,00 |
| VI. Iuran Izin Pemanfaatan Kawasan. | | |
| A. <i>Silvopastural system.</i> | per ijin per hektar per tahun | Rp. 2.000,00 |
| B. <i>Silvofishery system.</i> | per ijin per hektar per tahun | Rp. 2.000,00 |
| VII. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) pada Hutan Produksi. | | |
| A. Wilayah Sumatera, Sulawesi dan Papua. | per ijin per hektar per tahun | Rp. 1.900,00 |
| B. Wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku. | per ijin per hektar per tahun | Rp. 2.500,00 |
| C. Wilayah Nusa Tenggara. | per ijin per hektar per tahun | Rp. 1.500,00 |
| VIII. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi (IUPJL). | per ijin per hektar per tahun | Rp. 1.000,00 |
| IX. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK-HKm), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Desa (IUPHHK-HD). | per hektar per ijin | Rp. 2.600,00 |
| X. Ganti Rugi Tegakan. | per m ³ | 100% x harga patokan |
| XI. Penggantian Nilai Tegakan. | per m ³ | 100% x harga patokan |
| XII. Transaksi Kegiatan Penyerapan dan atau Penyimpanan Karbon dari Kawasan Hutan. | per ton | 10% x nilai penjualan karbon |

XIII. Hasil . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 12 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|--------------------|-------------------------|
| XIII. Hasil <i>Silvopastural system</i>. | per ton | 10% x harga patokan |
| XIV. Hasil <i>Silvofishery system</i>. | per ton | 10% x harga patokan |
| XV. Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH). | | |
| A. Pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi: | | |
| 1. Tidak melakukan penatausahaan hasil hutan; | per m ³ | 10 x 10 % harga patokan |
| 2. Tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan; | per m ³ | 10 x 10 % harga patokan |
| 3. Menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% dari total target volume yang ditentukan dalam RKT; | per m ³ | 10 x 10 % harga patokan |
| 4. Menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5 % dari volume per kelompok jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT; | per m ³ | 10 x 10 % harga patokan |
| 5. Menebang kayu yang dilindungi; | per m ³ | 15 x 10 % harga patokan |
| 6. Menebang kayu sebelum RKT disahkan; | per m ³ | 15 x 10 % harga patokan |
| 7. Menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor; | per m ³ | 15 x 10 % harga patokan |
| 8. Menebang kayu dibawah batas diameter yang diizinkan; | per m ³ | 15 x 10 % harga patokan |
| 9. Menebang kayu di luar blok tebangan yang diizinkan; | per m ³ | 15 x 10 % harga patokan |
| 10. Menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu diluar blok RKT, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang. | per m ³ | 15 x 10 % harga patokan |
| B. Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam; | | |
| 1. Tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan pada masa kegiatan pemanenan; | per m ³ | 10 x 10 % harga patokan |

2. Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 13 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|--------------------|-------------------------|
| 2. Tidak melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan pada masa kegiatan pemanenan; | per m ³ | 10 x 10 % harga patokan |
| 3. Menebang kayu yang dilindungi. | per m ³ | 15 x 10 % harga patokan |
| C. Pemegang IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman. | | |
| 1. Tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan; | per m ³ | 10 x 10 % harga patokan |
| 2. Tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan. | per m ³ | 10 x 10 % harga patokan |
| D. Pemegang IUPHHK pada HTI dan HTR dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi. | | |
| Menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin. | per m ³ | 15 x 10 % harga patokan |
| E. Pemegang IUPHHBK: | | |
| 1. Tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan bukan kayu; dan | per m ³ | 10 x 10 % harga patokan |
| 2. Tidak melakukan pengujian hasil hutan bukan kayu. | per m ³ | 10 x 10 % harga patokan |
| F. Pemegang IPHHK: | | |
| Tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan. | per m ³ | 50 % x harga patokan |
| G. Pemegang IPHHK atau IPHHBK: | | |
| 1. Menebang kayu yang dilindungi; atau | per m ³ | 10 x 10 % harga patokan |
| 2. Memungut hasil hutan yang melebihi 5 % dari target. | per m ³ | 10 x 10 % harga patokan |
| H. Pemegang IPHHBK: | | |
| Memungut hasil hutan yang melebihi 5 % dari target volume per jenis hasil hutan yang tertera dalam izin. | per m ³ | 10 x 10 % harga patokan |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 14 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|------------|-------------------|
| XVI. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam | | |
| A. Iuran Izin usaha penyediaan sarana pariwisata alam untuk perorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi. | | |
| 1. Taman Nasional. | | |
| a. Rayon I; | per hektar | Rp. 50.000.000,00 |
| b. Rayon II; | per hektar | Rp. 30.000.000,00 |
| c. Rayon III. | per hektar | Rp. 10.000.000,00 |
| 2. Taman Hutan Raya. | | |
| a. Rayon I; | per hektar | Rp. 50.000.000,00 |
| b. Rayon II; | per hektar | Rp. 30.000.000,00 |
| c. Rayon III. | per hektar | Rp. 10.000.000,00 |
| 3. Taman Wisata Alam. | | |
| a. Rayon I; | per hektar | Rp. 50.000.000,00 |
| b. Rayon II; | per hektar | Rp. 30.000.000,00 |
| c. Rayon III. | per hektar | Rp. 10.000.000,00 |
| 4. Taman Buru. | | |
| a. Rayon I; | per hektar | Rp. 50.000.000,00 |
| b. Rayon II; | per hektar | Rp. 30.000.000,00 |
| c. Rayon III. | per hektar | Rp. 10.000.000,00 |
| B. Iuran Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam. | | |
| 1. Jasa Informasi Pariwisata. | | |
| a. Perorangan; | per izin | Rp. 100.000,00 |
| b. Badan Usaha atau Koperasi. | per izin | Rp. 500.000,00 |
| 2. Jasa Pramuwisata (Interpreter atau pemandu). | | |

a. Perorangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 15 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|-----------|------------------|
| a. Perorangan; | per izin | Rp. 100.000,00 |
| b. Badan Usaha atau Koperasi. | per izin | Rp. 500.000,00 |
| 3. Jasa Transportasi. | | |
| a. Perorangan; | per izin | Rp. 200.000,00 |
| b. Badan Usaha atau Koperasi. | per izin | Rp. 1.000.000,00 |
| 4. Jasa Perjalanan Wisata. | | |
| a. Perorangan; | per izin | Rp. 200.000,00 |
| b. Badan Usaha atau Koperasi. | per izin | Rp. 1.000.000,00 |
| 5. Jasa Makanan dan Minuman. | | |
| a. Perorangan; | per izin | Rp. 100.000,00 |
| b. Badan Usaha atau Koperasi. | per izin | Rp. 500.000,00 |
| 6. Jasa Cideramata. | | |
| a. Perorangan; | per izin | Rp. 100.000,00 |
| b. Badan Usaha atau Koperasi. | per izin | Rp. 500.000,00 |
| C. Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam: | | |
| 1. Perorangan. | | |
| a. Taman Nasional. | | |
| 1) Rayon I. | | |
| a) Jasa informasi pariwisata; | per bulan | Rp. 150.000,00 |
| b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu); | per bulan | Rp. 150.000,00 |
| c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin); | per bulan | Rp. 150.000,00 |
| d) Jasa perjalanan wisata; | per bulan | Rp. 150.000,00 |
| e) Jasa makanan dan minuman; | per bulan | Rp. 150.000,00 |
| f) Jasa cinderamata. | per bulan | Rp. 150.000,00 |
| 2) Rayon II. | | |
| a) Jasa informasi pariwisata; | per bulan | Rp. 100.000,00 |
| b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu); | per bulan | Rp. 100.000,00 |

c) Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 16 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|-----------|----------------|
| c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin); | per bulan | Rp. 100.000,00 |
| d) Jasa perjalanan wisata; | per bulan | Rp. 100.000,00 |
| e) Jasa makanan dan minuman; | per bulan | Rp. 100.000,00 |
| f) Jasa cinderamata. | per bulan | Rp. 100.000,00 |
| 3) Rayon III. | | |
| a) Jasa informasi pariwisata; | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu); | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin); | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| d) Jasa perjalanan wisata; | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| e) Jasa makanan dan minuman; | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| f) Jasa cinderamata. | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| b. Taman Hutan Raya. | | |
| 1) Rayon I. | | |
| a) Jasa informasi pariwisata; | per bulan | Rp. 150.000,00 |
| b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu); | per bulan | Rp. 150.000,00 |
| c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin); | per bulan | Rp. 150.000,00 |
| d) Jasa perjalanan wisata; | per bulan | Rp. 150.000,00 |
| e) Jasa makanan dan minuman; | per bulan | Rp. 150.000,00 |
| f) Jasa cinderamata. | per bulan | Rp. 150.000,00 |
| 2) Rayon II. | | |
| a) Jasa informasi pariwisata; | per bulan | Rp. 100.000,00 |

b) Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|-----------|----------------|
| b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu); | per bulan | Rp. 100.000,00 |
| c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin); | per bulan | Rp. 100.000,00 |
| d) Jasa perjalanan wisata; | per bulan | Rp. 100.000,00 |
| e) Jasa makanan dan minuman; | per bulan | Rp. 100.000,00 |
| f) Jasa cinderamata. | per bulan | Rp. 100.000,00 |
| 3) Rayon III. | | |
| a) Jasa informasi pariwisata; | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu); | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin); | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| d) Jasa perjalanan wisata; | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| e) Jasa makanan dan minuman; | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| f) Jasa cinderamata. | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| c. Taman Wisata Alam. | | |
| 1) Rayon I. | | |
| a) Jasa informasi pariwisata; | per bulan | Rp. 150.000,00 |
| b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu); | per bulan | Rp. 150.000,00 |
| c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin); | per bulan | Rp. 150.000,00 |
| d) Jasa perjalanan wisata; | per bulan | Rp. 150.000,00 |
| e) Jasa makanan dan minuman; | per bulan | Rp. 150.000,00 |
| f) Jasa cinderamata. | per bulan | Rp. 150.000,00 |

2) Rayon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|-----------|----------------|
| 2) Rayon II. | | |
| a) Jasa informasi pariwisata; | per bulan | Rp. 100.000,00 |
| b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu); | per bulan | Rp. 100.000,00 |
| c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin); | per bulan | Rp. 100.000,00 |
| d) Jasa perjalanan wisata; | per bulan | Rp. 100.000,00 |
| e) Jasa makanan dan minuman; | per bulan | Rp. 100.000,00 |
| f) Jasa cinderamata. | per bulan | Rp. 100.000,00 |
| 3) Rayon III. | | |
| a) Jasa informasi pariwisata; | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu); | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin); | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| d) Jasa perjalanan wisata; | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| e) Jasa makanan dan minuman; | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| f) Jasa cinderamata. | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| 2. Badan Usaha atau Koperasi. | | |
| a. Taman Nasional. | | |
| 1) Rayon I. | | |
| a) Jasa informasi pariwisata; | per bulan | Rp. 800.000,00 |
| b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu); | per bulan | Rp. 800.000,00 |
| c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin); | per bulan | Rp. 800.000,00 |
| d) Jasa perjalanan wisata; | per bulan | Rp. 800.000,00 |

e) Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|-----------|----------------|
| e) Jasa makanan dan minuman; | per bulan | Rp. 800.000,00 |
| f) Jasa cinderamata. | per bulan | Rp. 800.000,00 |
| 2) Rayon II. | | |
| a) Jasa informasi pariwisata; | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu); | Per bulan | Rp. 400.000,00 |
| c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin); | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| d) Jasa perjalanan wisata; | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| e) Jasa makanan dan minuman; | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| f) Jasa cinderamata. | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| 3) Rayon III. | | |
| a) Jasa informasi pariwisata; | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu); | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin); | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| d) Jasa perjalanan wisata; | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| e) Jasa makanan dan minuman; | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| f) Jasa cinderamata. | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| b. Taman Hutan Raya. | | |
| 1) Rayon I. | | |
| a) Jasa informasi pariwisata; | per bulan | Rp. 800.000,00 |
| b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu); | per bulan | Rp. 800.000,00 |
| c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin); | per bulan | Rp. 800.000,00 |

d) Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 20 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|-----------|----------------|
| d) Jasa perjalanan wisata; | per bulan | Rp. 800.000,00 |
| e) Jasa makanan dan minuman; | per bulan | Rp. 800.000,00 |
| f) Jasa cinderamata. | per bulan | Rp. 800.000,00 |
| 2) Rayon II. | | |
| a) Jasa informasi pariwisata; | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu); | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin); | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| d) Jasa perjalanan wisata; | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| e) Jasa makanan dan minuman; | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| f) Jasa cinderamata. | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| 3) Rayon III. | | |
| a) Jasa informasi pariwisata; | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu); | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin); | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| d) Jasa perjalanan wisata; | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| e) Jasa makanan dan minuman; | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| f) Jasa cinderamata. | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| c. Taman Wisata Alam. | | |
| 1) Rayon I. | | |
| a) Jasa informasi pariwisata; | per bulan | Rp. 800.000,00 |
| b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu); | per bulan | Rp. 800.000,00 |
| c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin); | per bulan | Rp. 800.000,00 |

d) Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|-----------|----------------|
| d) Jasa perjalanan wisata; | per bulan | Rp. 800.000,00 |
| e) Jasa makanan dan minuman; | per bulan | Rp. 800.000,00 |
| f) Jasa cinderamata. | per bulan | Rp. 800.000,00 |
| 2) Rayon II. | | |
| a) Jasa informasi pariwisata; | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu); | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin); | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| d) Jasa perjalanan wisata; | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| e) Jasa makanan dan minuman; | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| f) Jasa cinderamata. | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| 3) Rayon III. | | |
| a) Jasa informasi pariwisata; | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu); | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin); | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| d) Jasa perjalanan wisata; | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| e) Jasa makanan dan minuman; | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| f) Jasa cinderamata. | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| d. Taman Buru. | | |
| 1) Rayon I. | | |
| a) Jasa informasi pariwisata; | per bulan | Rp. 800.000,00 |
| b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu); | per bulan | Rp. 800.000,00 |
| c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin); | per bulan | Rp. 800.000,00 |

d) Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|-----------|----------------|
| d) Jasa perjalanan wisata; | per bulan | Rp. 800.000,00 |
| e) Jasa makanan dan minuman; | per bulan | Rp. 800.000,00 |
| f) Jasa cinderamata; | per bulan | Rp. 800.000,00 |
| 2) Rayon II. | | |
| a) Jasa informasi pariwisata; | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu); | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin); | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| d) Jasa perjalanan wisata; | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| e) Jasa makanan dan minuman; | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| f) Jasa cinderamata. | per bulan | Rp. 400.000,00 |
| 3) Rayon III. | | |
| a) Jasa informasi pariwisata; | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu); | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin); | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| d) Jasa perjalanan wisata; | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| e) Jasa makanan dan minuman; | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| f) Jasa cinderamata. | per bulan | Rp. 200.000,00 |
| 3. Badan Usaha atau Koperasi dan Perorangan | | |
| Suaka Marga Satwa: | | |
| a) Jasa informasi pariwisata; | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu); | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin); | per bulan | Rp. 50.000,00 |

d) Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 23 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|--------------------|---|
| d) Jasa perjalanan wisata; | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| e) Jasa makanan dan minuman; | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| f) Jasa cinderamata. | per bulan | Rp. 50.000,00 |
| D. Penerimaan dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan. | | |
| 1. Penerimaan pariwisata alam. | | |
| a. Pungutan hasil usaha penyediaan sarana pariwisata alam di Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Tahura); | Produk yang dijual | 10% x net profit yang didasarkan pada laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit Akuntan Publik |
| b. Pungutan hasil usaha penyediaan sarana pariwisata alam di Taman Buru; | Produk yang dijual | 5% x produk yang dijual |
| c. Karcis masuk di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pariwisata Alam (KPA) dan Taman Buru (TB) pada hari kerja. | | |
| 1) Taman Nasional. | | |
| a) Karcis masuk pengunjung umum. | | |
| i. Rayon I. | | |
| (a) Wisatawan Mancanegara (WNA); | per orang per hari | Rp. 250.000,00 |
| (b) Wisatawan Nusantara (WNI). | per orang per hari | Rp. 20.000,00 |
| ii. Rayon II. | | |
| (a) Wisatawan Mancanegara (WNA); | per orang per hari | Rp. 200.000,00 |
| (b) Wisatawan Nusantara (WNI). | per orang per hari | Rp. 10.000,00 |
| iii. Rayon III. | | |
| (a) Wisatawan Mancanegara (WNA); | per orang per hari | Rp. 150.000,00 |

(b) Wisatawan. . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 24 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|--------------------|----------------|
| (b) Wisatawan Nusantara (WNI). | per orang per hari | Rp. 5.000,00 |
| b) Karcis masuk rombongan pelajar / mahasiswa (minimal 10 orang). | | |
| i. Rayon I. | | |
| (a) Wisatawan Mancanegara (WNA); | per orang per hari | Rp. 200.000,00 |
| (b) Wisatawan Nusantara (WNI). | per orang per hari | Rp. 12.000,00 |
| ii. Rayon II. | | |
| (a) Wisatawan Mancanegara (WNA); | per orang per hari | Rp. 150.000,00 |
| (b) Wisatawan Nusantara (WNI). | per orang per hari | Rp. 6.000,00 |
| iii. Rayon III. | | |
| (a) Wisatawan Mancanegara (WNA); | per orang per hari | Rp. 100.000,00 |
| (b) Wisatawan Nusantara (WNI). | per orang per hari | Rp. 3.000,00 |
| c) Pas masuk kendaraan darat untuk sekali masuk . | | |
| i. Roda 2 (dua); | per unit per hari | Rp. 5.000,00 |
| ii. Roda 4 (empat); | per unit per hari | Rp. 10.000,00 |
| iii. Roda 6 (enam) atau lebih; | per unit per hari | Rp. 50.000,00 |
| iv. Sepeda; | per unit per hari | Rp. 2.000,00 |
| v. Kuda. | per ekor per hari | Rp. 1.500,00 |
| d) Pas masuk kendaraan air untuk sekali masuk. | | |
| i. Kapal motor 40 s/d 100 PK; | per unit per hari | Rp. 100.000,00 |
| ii. Kapal motor 100 s/d 500 PK; | per unit per hari | Rp. 150.000,00 |
| iii. Kapal motor diatas 500 PK; | per unit per hari | Rp. 200.000,00 |

iv. Kapal . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 25 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|--------------------|-------------------|
| iv. Kapal pesiar/ <i>cruiser ship</i> dengan kapasitas angkut: | | |
| (a) < 50 penumpang; | per unit per hari | Rp. 2.000.000,00 |
| (b) 50 s.d < 100 penumpang; | per unit per hari | Rp. 4.000.000,00 |
| (c) 100 s.d < 200 penumpang; | per unit per hari | Rp. 8.000.000,00 |
| (d) 200 s.d < 1.000 penumpang; | per unit per hari | Rp. 15.000.000,00 |
| (e) 1.000 s.d < 3.000 penumpang; | per unit per hari | Rp. 30.000.000,00 |
| (f) > 3.000 penumpang. | per unit per hari | Rp. 50.000.000,00 |
| 2) Taman Wisata Alam. | | |
| a) Karcis masuk pengunjung umum. | | |
| (1) Rayon I. | | |
| (a) Wisatawan Mancanegara (WNA); | per orang per hari | Rp. 250.000,00 |
| (b) Wisatawan Nusantara (WNI). | per orang per hari | Rp. 20.000,00 |
| (2) Rayon II. | | |
| (a) Wisatawan Mancanegara (WNA); | per orang per hari | Rp. 200.000,00 |
| (b) Wisatawan Nusantara (WNI). | per orang per hari | Rp. 10.000,00 |
| (3) Rayon III. | | |
| (a) Wisatawan Mancanegara (WNA); | per orang per hari | Rp. 100.000,00 |
| (b) Wisatawan Nusantara (WNI). | per orang per hari | Rp. 5.000,00 |

b) Karcis . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 26 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|--------------------|----------------|
| b) Karcis masuk rombongan pelajar /mahasiswa (minimal 10 orang). | | |
| (1) Rayon I. | | |
| (a) Wisatawan Mancanegara (WNA); | per orang per hari | Rp. 200.000,00 |
| (b) Wisatawan Nusantara (WNI). | per orang per hari | Rp. 12.000,00 |
| (2) Rayon II. | | |
| (a) Wisatawan Mancanegara (WNA); | per orang per hari | Rp. 150.000,00 |
| (b) Wisatawan Nusantara (WNI). | per orang per hari | Rp. 6.000,00 |
| (3) Rayon III. | | |
| (a) Wisatawan Mancanegara (WNA); | per orang per hari | Rp. 100.000,00 |
| (b) Wisatawan Nusantara (WNI). | per orang per hari | Rp. 3.000,00 |
| c) Pas masuk kendaraan darat untuk sekali masuk. | | |
| (1) Roda 2 (dua); | per unit per hari | Rp. 5.000,00 |
| (2) Roda 4 (empat); | per unit per hari | Rp. 10.000,00 |
| (3) Roda 6 (enam) atau lebih; | per unit per hari | Rp. 50.000,00 |
| (4) Sepeda; | per unit per hari | Rp. 2.000,00 |
| (5) Kuda. | per ekor per hari | Rp. 1.500,00 |
| d) Pas masuk kendaraan air untuk sekali masuk. | | |
| (1) Kapal motor 40 s/d 100 PK; | per unit per hari | Rp. 100.000,00 |
| (2) Kapal motor 100 s/d 500 PK; | per unit per hari | Rp. 150.000,00 |
| (3) Kapal motor diatas 500 PK; | per unit per hari | Rp. 200.000,00 |
| (4) Kapal pesiar/ <i>cruiser</i> <i>ship</i> dengan kapasitas angkut: | | |

(a) < 50 penumpang . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 27 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|--------------------|-------------------|
| (a) < 50 penumpang; | per unit per hari | Rp. 2.000.000,00 |
| (b) 50 s.d < 100 penumpang; | per unit per hari | Rp. 4.000.000,00 |
| (c) 100 s.d < 200 penumpang; | per unit per hari | Rp. 8.000.000,00 |
| (d) 200 s.d < 1.000 penumpang; | per unit per hari | Rp. 15.000.000,00 |
| (e) 1.000 s.d < 3.000 penumpang; | per unit per hari | Rp. 30.000.000,00 |
| (f) > 3.000 penumpang. | per unit per hari | Rp. 50.000.000,00 |
| 3) Taman Buru. | | |
| a) Karcis masuk pengunjung untuk kegiatan berburu. | | |
| (1) Rayon I. | | |
| (a) Wisatawan Mancanegara (WNA); | per orang per hari | Rp. 250.000,00 |
| (b) Wisatawan Nusantara (WNI). | per orang per hari | Rp. 150.000,00 |
| (2) Rayon II. | | |
| (a) Wisatawan Mancanegara (WNA); | per orang per hari | Rp. 200.000,00 |
| (b) Wisatawan Nusantara (WNI). | per orang per hari | Rp. 100.000,00 |
| (3) Rayon III. | | |
| (a) Wisatawan Mancanegara (WNA); | per orang per hari | Rp. 150.000,00 |
| (b) Wisatawan Nusantara (WNI). | per orang per hari | Rp. 50.000,00 |
| b) Karcis masuk rombongan pelajar /mahasiswa untuk kegiatan berburu dan wisata/rekreasi (minimal 10 orang). | | |

(1) Rayon I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|--------------------|------------------|
| (1) Rayon I. | | |
| (a) Wisatawan Mancanegara (WNA); | per orang per hari | Rp. 75.000,00 |
| (b) Wisatawan Nusantara (WNI). | per orang per hari | Rp. 10.000,00 |
| (2) Rayon II. | | |
| (a) Wisatawan Mancanegara (WNA); | per orang per hari | Rp. 50.000,00 |
| (b) Wisatawan Nusantara (WNI). | per orang per hari | Rp. 7.500,00 |
| (3) Rayon III. | | |
| (a) Wisatawan Mancanegara (WNA); | per orang per hari | Rp. 25.000,00 |
| (b) Wisatawan Nusantara (WNI). | per orang per hari | Rp. 5.000,00 |
| c) Pas masuk kendaraan darat untuk sekali masuk. | | |
| (1) Roda 2 (dua); | per unit per hari | Rp. 10.000,00 |
| (2) Roda 4 (empat); | per unit per hari | Rp. 20.000,00 |
| (3) Roda 6 (enam) atau lebih; | per unit per hari | Rp. 50.000,00 |
| (4) Sepeda; | per unit per hari | Rp. 2.500,00 |
| (5) Kuda. | per ekor per hari | Rp. 1.500,00 |
| d) Pas masuk kendaraan air untuk sekali masuk. | | |
| (1) Kapal motor 40 s/d 100 PK; | per unit per hari | Rp. 100.000,00 |
| (2) Kapal motor 100 s/d 500 PK; | per unit per hari | Rp. 150.000,00 |
| (3) Kapal motor diatas 500 PK; | per unit per hari | Rp. 200.000,00 |
| (4) Kapal pesiar/ <i>cruiser ship</i> dengan kapasitas angkut: | | |
| (a) < 50 penumpang; | per unit per hari | Rp. 2.000.000,00 |

(b) 50 s.d . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 29 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|--------------------|-------------------|
| (b) 50 s.d < 100 penumpang; | per unit per hari | Rp. 4.000.000,00 |
| (c) 100 s.d < 200 penumpang; | per unit per hari | Rp. 8.000.000,00 |
| (d) 200 s.d < 1.000 penumpang; | per unit per hari | Rp. 15.000.000,00 |
| (e) 1.000 s.d < 3.000 penumpang; | per unit per hari | Rp. 30.000.000,00 |
| (f) > 3.000 penumpang. | per unit per hari | Rp. 50.000.000,00 |
| 4) Suaka Margasatwa. | | |
| a) Pengunjung Mancanegara (WNA); | per orang per hari | Rp. 250.000,00 |
| b) Pengunjung Nusantara (WNI); | per orang per hari | Rp. 20.000,00 |
| c) Pas masuk kendaraan darat untuk sekali masuk; | | |
| (1) Roda 2 (dua); | per unit per hari | Rp. 5.000,00 |
| (2) Roda 4 (empat); | per unit per hari | Rp. 10.000,00 |
| (3) Roda 6 (enam) atau lebih; | per unit per hari | Rp. 50.000,00 |
| (4) Sepeda; | per unit per hari | Rp. 2.000,00 |
| (5) Kuda . | per ekor per hari | Rp. 1.500,00 |
| d) Pas masuk kendaraan air untuk sekali masuk; | | |
| (1) Kapal motor 40 s/d 100 PK; | per unit per hari | Rp. 100.000,00 |
| (2) Kapal motor 100 s/d 500 PK; | per unit per hari | Rp. 150.000,00 |
| (3) Kapal motor diatas 500 PK; | per unit per hari | Rp. 200.000,00 |
| (4) Kapal pesiar/ <i>cruiser ship</i> dengan kapasitas angkut: | | |
| (a) < 50 penumpang; | per unit per hari | Rp. 2.000.000,00 |
| (b) 50 s.d < 100 penumpang; | per unit per hari | Rp. 4.000.000,00 |

(c) 100 s.d . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 30 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| (c) 100 s.d < 200 penumpang; | per unit per hari | Rp. 8.000.000,00 |
| (d) 200 s.d < 1.000 penumpang; | per unit per hari | Rp. 15.000.000,00 |
| (e) 1.000 s.d < 3.000 penumpang; | per unit per hari | Rp. 30.000.000,00 |
| (f) > 3.000 penumpang. | per unit per hari | Rp. 50.000.000,00 |
| d. Karcis masuk di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB) pada hari libur. | per orang per hari | 150% dari harga pada hari kerja |
| 2. Pungutan jasa kegiatan wisata alam. | | |
| a. Pungutan kegiatan wisata alam di Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Wisata Alam), dan Taman Buru. | | |
| 1) Kegiatan wisata umum. | | |
| (1) Berkemah; | per orang per hari per kemah | Rp. 5.000,00 |
| (2) Penelusuran hutan (<i>tracking</i>), mendaki gunung (<i>hiking-climbing</i>); | per orang per paket per kegiatan | Rp. 5.000,00 |
| (3) Penelusuran gua (<i>caving</i>); | per orang per paket per kegiatan | Rp. 10.000,00 |
| (4) Pengamatan hidupan liar; | per orang per paket per kegiatan | Rp. 10.000,00 |
| (5) Menyelam (<i>scuba diving</i>); | per orang per hari | Rp. 25.000,00 |
| (6) Snorkelling; | per orang per hari | Rp. 15.000,00 |
| (7) Kano/bersampan; | per rang per hari | Rp. 25.000,00 |
| (8) Selancar; | per orang per hari | Rp. 25.000,00 |
| (9) Arung jeram; | per orang per hari | Rp. 15.000,00 |
| (10) Memancing; | per orang per hari | Rp. 25.000,00 |

(11)Canopy . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 31 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|----------------------------------|-------------------|
| (11) Canopy trail; | per orang per sekali masuk | Rp. 25.000,00 |
| (12) Outbound training. | per orang per paket per kegiatan | Rp. 150.000,00 |
| 2) Kegiatan wisata rombongan pelajar / mahasiswa (minimal 10 Orang). | | |
| (1) Berkemah; | per orang per hari per kemah | Rp. 2.500,00 |
| (2) Penelusuran hutan (<i>tracking</i>), mendaki gunung (<i>hiking-climbing</i>); | per orang per paket per kegiatan | Rp. 2.500,00 |
| (3) Penelusuran gua (<i>caving</i>); | per orang per paket per kegiatan | Rp. 5.000,00 |
| (4) Pengamatan hidupan liar; | per orang per paket per kegiatan | Rp. 5.000,00 |
| (5) Menyelam (<i>scuba diving</i>); | per orang per hari | Rp. 15.000,00 |
| (6) Snorkelling; | per orang per hari | Rp. 10.000,00 |
| (7) Kano/bersampan; | per orang per hari | Rp. 15.000,00 |
| (8) Selancar; | per orang per hari | Rp. 15.000,00 |
| (9) Arung jeram; | per orang per hari | Rp. 10.000,00 |
| (10) Memancing; | per orang per hari | Rp. 15.000,00 |
| (11) Canopy trail; | per orang per sekali masuk | Rp. 15.000,00 |
| (12) Outbound training. | per orang per paket per kegiatan | Rp. 75.000,00 |
| 3) Snapshot Film Komersial. | | |
| (1) Video Komersil; | per paket | Rp. 10.000.000,00 |
| (2) <i>Handycam</i> ; | per paket | Rp. 1.000.000,00 |
| (3) Foto. | per paket | Rp. 250.000,00 |

b. penggunaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 32 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|--------------------|----------------|
| b. penggunaan fasilitas pengunjung untuk kegiatan pariwisata alam dan atau kegiatan penelitian/pendidikan. | | |
| (1) Pondok wisata/pondok tamu. | | |
| (a) Superior; | per kamar per hari | Rp. 200.000,00 |
| (b) Delux; | per kamar per hari | Rp. 150.000,00 |
| (c) Standar. | per kamar per hari | Rp. 100.000,00 |
| (2) Ruang pertemuan (<i>conference room</i>). | | |
| (a) Kapasitas < 100 orang; | per ruang per hari | Rp. 150.000,00 |
| (b) Kapasitas 100-200 orang; | per ruang per hari | Rp. 250.000,00 |
| (c) Kapasitas >200 orang. | per ruang per hari | Rp. 350.000,00 |
| (3) Pondok Peneliti. | | |
| (a) Superior; | per kamar per hari | Rp. 150.000,00 |
| (b) De Lux; | per kamar per hari | Rp. 100.000,00 |
| (c) Standar; | per kamar per hari | Rp. 75.000,00 |
| (d) Peralatan tenda camping; | | |
| - Kapasitas < 25 orang; | ruang per hari | Rp. 100.000,00 |
| - Kapasitas 25-50 orang; | ruang per hari | Rp. 150.000,00 |
| - Kapasitas >50 orang. | ruang per hari | Rp. 250.000,00 |
| (e) Kamera bawah air (<i>underwater</i>); | unit per hari | Rp. 250.000,00 |
| (f) Banana boat; | unit per hari | Rp. 150.000,00 |
| (g) Glass bottom boat; | unit per hari | Rp. 250.000,00 |
| (h) Sepeda/sepeda air; | unit per hari | Rp. 75.000,00 |
| (i) Kano /sampan; | unit per hari | Rp. 50.000,00 |
| (j) Speed-boat; | unit per hari | Rp. 250.000,00 |
| (k) Kapal motor. | unit per hari | Rp. 500.000,00 |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 33 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|------------|----------------------|
| XVII. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar. | | |
| A. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar. | | |
| 1. Iuran Izin Pengedar Dalam Negeri; | per izin | Rp. 2.500.000,00 |
| 2. Iuran Izin Pengedar Luar Negeri; | per izin | Rp. 10.000.000,00 |
| 3. Iuran Izin Penangkaran; | | |
| a. Perorangan; | per izin | Rp. 500.000,00 |
| b. Badan Hukum. | per izin | Rp. 2.500.000,00 |
| 4. Iuran Izin Peragaan; | per izin | Rp. 15.000.000,00 |
| 5. Iuran Izin Lembaga Konservasi: | | |
| a. Iuran Izin Kebun Binatang; | per izin | Rp. 15.000.000,00 |
| b. Iuran Izin Taman Safari; | per izin | Rp. 20.000.000,00 |
| c. Iuran Izin Taman Satwa; | per izin | Rp. 10.000.000,00 |
| d. Iuran Izin Taman Satwa Khusus; | per izin | Rp. 10.000.000,00 |
| e. Iuran Izin Botani; | per izin | Rp. 7.500.000,00 |
| f. Iuran Izin Museum <i>Zoology</i> ; | per izin | Rp. 7.500.000,00 |
| g. Iuran Izin Herbarium; | per izin | Rp. 5.000.000,00 |
| h. Iuran Izin Taman Tumbuhan Khusus. | per izin | Rp. 5.000.000,00 |
| 6. Iuran izin pengelolaan sarang burung wallet di dalam zona/blok pemanfaatan kawasan pelestarian alam; | per izin | Rp. 25.000.000,00 |
| 7. Iuran Izin Pengusahaan Taman Buru; | per hektar | Rp. 15.000,00 |
| 8. Iuran Akta Buru di Taman Buru; | | |
| a. Burung; | per akta | Rp. 50.000,00 |
| b. Satwa kecil; | per akta | Rp. 100.000,00 |
| c. Satwa besar. | per akta | Rp. 200.000,00 |
| 9. Iuran Hasil Buruan Satwa Buru. | | |
| Satwa tidak dilindungi. | per ekor | 100% x harga patokan |

10. Iuran . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 34 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---|----------------------|
| 10. Iuran izin pengambilan sampel penelitian (mati/bagian-bagian). | | |
| a. Warga Negara Indonesia; | per izin | Rp. 50.000,00 |
| b. Warga Negara Asing. | per izin | Rp. 500.000,00 |
| B. Pungutan Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar. | | |
| 1. Pungutan penangkapan/pengambilan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi oleh Undang-undang dari Habitat Alam untuk tujuan perdagangan, lembaga konservasi dan hasil perburuan satwa buru. | | |
| a. Perdagangan; | per ekor atau per batang atau per pcs atau per kg | 6% x harga patokan |
| b. Lembaga Konservasi; | per ekor atau per batang | 5% x harga patokan |
| c. Perburuan. | per ekor | 100% x harga patokan |
| 2. Pungutan perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil pengambilan/penangkapan tumbuhan atau satwa liar dari habitat alam atau dan penangkaran. | | |
| a. Perdagangan tumbuhan atau satwa liar hasil dari alam ke luar negeri. | per ekor atau per batang atau per pcs atau per kg | 8% x harga patokan |
| b. Perdagangan tumbuhan atau satwa liar hasil penangkaran jenis asli Indonesia ke luar negeri. | | |
| 1) Perbanyak tumbuhan (<i>artificial propagation</i>); | per batang atau per kg | 5% x harga patokan |
| 2) Pengembangbiakan satwa (<i>captive breeding</i>); | | |
| a) F1 dan F2; | per ekor | 4% x harga patokan |
| b) F3 dan seterusnya. | per ekor | 2% x harga patokan |

3) Hasil . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 35 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|----------------------------------|----------------------|
| 3) Hasil pembesaran (<i>ranching</i>). | per ekor | 5% x harga patokan |
| 3. Pengangkutan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil penangkaran jenis-jenis tumbuhan atau satwa liar asal import. | | |
| a. Perbanyak tumbuhan (<i>artificial propagation</i>); | per batang atau per kg | 4% x harga patokan |
| b. Pengembangbiakan satwa (<i>captive breeding</i>); | Ekor | 2% x harga patokan |
| c. Hasil pembesaran (<i>ranching</i>). | Ekor | 5% x harga patokan |
| 4. Pungutan sebagai kompensasi kewajiban pelepasliaran (<i>restocking</i>) hasil penangkaran. | | |
| Hasil kompensasi pelepasliaran (<i>restocking</i>) hasil penangkaran. | per ekor atau per batang per pcs | 200% x harga patokan |
| 5. Pungutan administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. | | |
| a. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN); | per SATS | Rp. 35.000,00 |
| b. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATS - LN) Non Appendiks CITES; | per SATS-LN | Rp. 40.000,00 |
| c. SATS - LN Appendiks CITES. | per SATS-LN | Rp. 50.000,00 |
| 6. Pungutan untuk kegiatan penelitian, pengambilan gambar, serta pengambilan dan pengangkutan specimen tumbuhan dan satwa liar. | | |
| a. Pengambilan gambar di darat, perairan dan dari udara dalam bentuk film dan foto komersial. | | |
| 1) Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional dan Taman Wisata Alam) dan Taman Buru; | | |
| a) Warga Negara Asing; | per paket | Rp. 20.000.000,00 |

b) Warga . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 36 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|-------------------|
| b) Warga Negara Indonesia. | per paket | Rp. 10.000.000,00 |
| 2) Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa); | | |
| a) Warga Negara Asing; | per paket | Rp. 4.000.000,00 |
| b) Warga Negara Indonesia. | per paket | Rp. 2.000.000,00 |
| b. Kegiatan penelitian menggunakan kawasan. | | |
| 1) Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional dan Taman Wisata Alam). | | |
| a) Warga Negara Asing. | | |
| (1) < 1 bulan; | per orang | Rp. 5.000.000,00 |
| (2) 1 bulan – 6 bulan; | per orang | Rp. 10.000.000,00 |
| (3) 7 bulan – 12 bulan. | per orang | Rp. 15.000.000,00 |
| b) Warga Negara Indonesia. | | |
| (1) < 1 bulan; | per orang | Rp. 100.000,00 |
| (2) 1 bulan – 6 bulan; | per orang | Rp. 150.000,00 |
| (3) 7 bulan – 12 bulan. | per orang | Rp. 250.000,00 |
| 2) Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa). | | |
| a) Warga Negara Asing; | | |
| (1) < 1 bulan; | per orang | Rp. 7.500.000,00 |
| (2) 1 bulan – 6 bulan; | per orang | Rp. 12.500.000,00 |
| (3) 7 bulan – 12 bulan. | per orang | Rp. 17.500.000,00 |
| b) Warga Negara Indonesia. | | |
| (1) < 1 bulan; | per orang | Rp. 125.000,00 |
| (2) 1 bulan – 6 bulan; | per orang | Rp. 175.000,00 |
| (3) 7 bulan – 12 bulan. | per orang | Rp. 300.000,00 |

c. Pengambilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 37 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|--|-------------------------------|
| <p>c. Pengambilan dan pengangkutan sampel spesimen tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi untuk tujuan penelitian.</p> | <p>per batang atau per pcs atau per cc</p> | <p>50% x harga patokan</p> |
| <p>7. Iuran pemanfaatan sarang burung walet di kawasan konservasi.</p> | <p>per kg</p> | <p>6% x harga patokan</p> |
| <p>XVIII. Denda Administratif Bidang Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam.</p> | | |
| <p>A. Penyimpangan dokumen/kegiatan bidang usaha tumbuhan dan satwa liar:</p> | | |
| <p>1. Kelebihan jumlah atau perbedaan jenis spesimen yang diangkut/dibawa.</p> | | |
| <p>a. Dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar – Dalam Negeri (SATS – DN);</p> | <p>per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per <i>cubic</i> atau per <i>centimeter</i> atau per satuan lainnya atau per jenis</p> | <p>5.000% x harga patokan</p> |
| <p>b. Dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar – Luar Negeri (SATS – LN).</p> | <p>per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per <i>cubic</i> atau per <i>centimeter</i> atau per satuan lainnya, atau per jenis</p> | <p>5.000% x harga patokan</p> |
| <p>2. Merubah isi dokumen baik jumlah dan atau jenis spesimen yang diangkut/dibawa :</p> | | |
| <p>a. Dokumen SATS – DN;</p> | <p>per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per <i>cubic</i> atau per <i>centimeter</i> atau per satuan lainnya, atau per jenis</p> | <p>5.000% x harga patokan</p> |

b. Dokumen . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 38 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|--|---|
| <p>b. Dokumen SATS -LN;</p> <p>3. Dokumen yang digunakan sudah kadaluwarsa atau pengangkutan tanpa dokumen:</p> <p>a. Dokumen SATS - DN;</p> <p>b. Dokumen SATS - LN.</p> | <p>per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per <i>cubic</i> atau per <i>centimeter</i> atau per satuan lainnya, atau per jenis</p> <p>per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per <i>cubic</i> atau per <i>centimeter</i> atau per satuan lainnya, atau per jenis</p> <p>per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per <i>cubic</i> atau per <i>centimeter</i> atau per satuan lainnya, atau per jenis</p> | <p>5.000% x harga patokan</p> <p>5.000% x harga patokan</p> <p>5.000% x harga patokan</p> |
| <p>B. Penyimpangan terhadap izin usaha di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam:</p> <p>1. Melakukan pemindahtanganan izin tanpa persetujuan pemberi izin usaha Bidang PHKA;</p> <p>2. Perolehan induk, benih/bibit penangkaran tanpa izin;</p> <p>3. Tidak melakukan kewajiban pengembalian ke habitat alam (<i>restocking</i>) atau tidak membayar kompensasi pelepas liaran (<i>restocking</i>);</p> <p>4. Tidak membuat buku induk (<i>stud book</i>) dan atau buku catatan harian (<i>log book</i>) dan atau tidak melakukan penandaan dan atau sertifikasi;</p> | <p>per unit usaha</p> <p>per ekor</p> <p>per ekor</p> <p>per unit usaha per tahun</p> | <p>5.000% x harga patokan</p> <p>5.000% x harga patokan</p> <p>5.000% x harga patokan</p> <p>5.000% x harga patokan</p> |

5. Pemanenan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 39 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---|----------------------------|
| 5. Pemanenan hasil pembesaran tanpa izin. | per ekor | 5.000% x harga patokan |
| C. Pelanggaran terhadap kelebihan jumlah dari izin yang diberikan (perburuan, pengambilan tumbuhan dan satwa liar dari alam dan buah, biji-bijian, daun, bunga, getah). | per izin | 100% x harga patokan |
| XIX. Hasil Lelang Kayu Temuan Dan Hasil Lelang Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang. | per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per meter atau per kubik atau per satuan lainnya, | 100% x hasil lelang bersih |
| XX. Iuran Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Dalam Kawasan Hutan Konservasi. | | |
| 1. Sumber Air. | | |
| a. Investasi Skala Mikro; | per ijin | Rp. 1.250.000,00 |
| b. Investasi Skala Kecil; | per ijin | Rp. 12.500.000,00 |
| c. Investasi Skala Menengah; | per ijin | Rp. 250.000.000,00 |
| d. Investasi Skala Besar. | per ijin | Rp.1.250.000.000,00 |
| 2. Sarana Prasarana. | | |
| a. Investasi Skala Mikro; | per ha per ijin | Rp. 5.000.000,00 |
| b. Investasi Skala Kecil; | per ha per ijin | Rp. 10.000.000,00 |
| c. Investasi Skala Menengah; | per ha per ijin | Rp. 30.000.000,00 |
| d. Investasi Skala Besar. | per ha per ijin | Rp. 50.000.000,00 |
| XXI. Iuran Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) Dalam Kawasan Hutan Konservasi. | | |
| 1. Sumber Air. | | |
| a. Mikrohidro; | per ijin | Rp. 1.000.000,00 |

b. Minihidro . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 40 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|--|------------------------------------|
| b. Minihidro. | per ijin | Rp. 2.500.000,00 |
| 2. Sarana Prasarana. | | |
| a. Mikrohidro; | per hektar per ijin | Rp. 5.000.000,00 |
| b. Minihidro. | per hektar per ijin | Rp. 5.000.000,00 |
| XXII. Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) Dalam Kawasan Hutan Konservasi. | | |
| 1. Investasi Skala Mikro; | per volume per penggunaan | 2% x harga dasar air PDAM setempat |
| 2. Investasi Skala Kecil; | per volume per penggunaan | 4% x harga dasar air PDAM setempat |
| 3. Investasi Skala Menengah; | per volume per penggunaan | 6% x harga dasar air PDAM setempat |
| 4. Investasi Skala Besar. | per volume per penggunaan | 8% x harga dasar air PDAM setempat |
| XXIII. Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air (PUPEA) dalam Kawasan Hutan Konservasi. | | |
| 1. Mikrohidro; | per volume per penggunaan | 2% x harga dasar listrik PLN |
| 2. Minihidro. | per volume per penggunaan | 2% x harga dasar listrik PLN |
| XXIV. Kegiatan Perijinan di Bidang Perbenihan. | | |
| 1. Izin pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri. | per kg atau per batang atau per stek atau per plantlet | 2% x harga patokan |
| 2. Perpanjangan izin pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri. | per kg atau per batang atau per stek atau per plantlet | 1% x harga patokan |
| 3. Izin pengeluaran benih dan/atau bibit ke luar negeri. | per kg atau per batang atau per stek atau per plantlet | 6% x harga patokan |

4. Perpanjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 41 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|--|--------------------|
| 4. Perpanjangan izin pengeluaran benih dan/atau bibit ke luar negeri. | per kg atau per batang atau per stek atau per plantlet | 3% x harga patokan |
| XXV. Sertifikasi Benih. | | |
| 1. Sertifikasi sumber benih. | | |
| a. Identifikasi sumber benih dalam kawasan hutan untuk: | | |
| 1) Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT); | per hektar | Rp. 100.000,00 |
| 2) Tegakan Benih Terseleksi (TBS); | per hektar | Rp. 100.000,00 |
| 3) Areal Produksi Benih (APB); | per hektar | Rp. 100.000,00 |
| 4) Tegakan Benih Provenan (TBP); | per hektar | Rp. 250.000,00 |
| 5) Kebun Benih Semai (KBS); | per hektar | Rp. 250.000,00 |
| 6) Kebun Benih Klon (KBK); | per hektar | Rp. 250.000,00 |
| 7) Kebun Pangkas (KP). | per pohon | Rp. 200,00 |
| b. Identifikasi sumber benih di luar kawasan hutan untuk: | | |
| 1) Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT); | per hektar | Rp. 25.000,00 |
| 2) Tegakan Benih Terseleksi (TBS); | per hektar | Rp. 25.000,00 |
| 3) Areal Produksi Benih (APB); | per hektar | Rp. 25.000,00 |
| 4) Tegakan Benih Provenan (TBP); | per hektar | Rp. 200.000,00 |
| 5) Kebun Benih Semai (KBS); | per hektar | Rp. 200.000,00 |
| 6) Kebun Benih Klon (KBK); | per hektar | Rp. 200.000,00 |
| 7) Kebun Pangkas (KP). | per pohon | Rp. 100,00 |
| c. Sertifikat sumber benih. | per sertifikat | Rp. 100.000,00 |
| 2. Sertifikat mutu benih. | | |
| Pengujian benih untuk: | | |
| 1) Sertifikat mutu benih; | per contoh | Rp. 200.000,00 |

2) Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 42 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|------------------------------|--------------------|
| 2) Surat keterangan mutu benih. | per contoh | Rp. 100.000,00 |
| 3. Sertifikasi mutu bibit generatif. Pemeriksaan bibit generatif untuk: | | |
| 1) Sertifikasi mutu bibit generatif; | per batang | Rp. 200,00 |
| 2) Surat keterangan mutu bibit generatif. | per batang | Rp. 100,00 |
| 4. Sertifikat mutu bibit kultur jaringan. Pemeriksaan bibit kultur jaringan untuk: | | |
| 1) Sertifikat mutu bibit vegetatif; | per batang | Rp. 400,00 |
| 2) Surat keterangan mutu bibit vegetatif. | per batang | Rp. 200,00 |
| XXVI. Iuran Pengumpulan/Pengunduhan Benih dan Anakan. | | |
| 1. Akasia, mangium, klampis lamtoro merah formis (<i>Acacia sp.</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT), Tegakan Benih Terseleksi (TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih Semai (KBS), Kebun Benih Klon (KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 2. Damar (<i>Agathis lorantifolia</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |

c. Tegakkan. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|------------------------------|--------------------|
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 3. Pulai (<i>Alstonia scholaris</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau stek | Rp. 100,00 |
| 4. Rasamala (<i>Altingia excelsa</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 5. Jabon (<i>Anthocephalus sp.</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 6. Gaharu (<i>Aquilaria malacensis</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |

b. Areal . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 44 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|------------------------------|--------------------|
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 7. Api-api (<i>Avicennia alba</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 8. Mimba (<i>Azadirachta indica</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 9. Tancang (<i>Bruguiera gymnorrhiza</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per batang | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per batang | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per batang | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per batang | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |

10. Secang . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 45 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|---------------------------------|--------------------|
| 10. Secang (<i>Caesalpinia sappan</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 11. Kaliandra (<i>Calliandra sp.</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 12. Nyamplung (<i>Calophyllum inophyllum</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 13. Johar (<i>Cassia siamea</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |

e. Kebun . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 46 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|------------------------------|--------------------|
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 14. Cemara (<i>Casuarina equisetifolia</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 15. Saninten (<i>Castanopsis argenta</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 16. Sono (<i>Dalbergia sp.</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 17. Keruing (<i>Dipterocarpus sp.</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |

c. Tegakkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 47 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|------------------------------|--------------------|
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 18. Kapur (<i>Dryobalanops sp.</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 19. Rajumas (<i>Duabanga moluccana</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 20. Jelutung (<i>Dyera costulata</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 21. Uru (<i>Elmerilia sp.</i>). | | |

a. Tegakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|------------------------------|--------------------|
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 22. Sengon buto (<i>Enterolobium cyclocarpum</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 23. Eukaliptus, ampupu, pelita, leda (<i>Eucalyptus sp.</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 24. <i>Eugenia polyantha</i> (salam). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |

e. Kebun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|------------------------------|--------------------|
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 25. Ulin (<i>Eusideroxylon zwageri</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 26. Filisium (<i>Filicium decipiens</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 27. Kiara (<i>Ficus sp.</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 28. Tembesu (<i>Fragarea fragrans</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |

b. Areal . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 50 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|------------------------------|--------------------|
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 29. <i>Glirisida (Gliricidia sepium)</i> . | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 30. <i>Gmelina (Gmelina arborea)</i> . | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 31. <i>Khaya (Khaya anthoteca)</i> . | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |

32. Bungur . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 51 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|---------------------------------|--------------------|
| 32. Bungur (<i>Lagerstroemia speciosa</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 33. Lamtoro, kemlanding (<i>Leucaena sp.</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 34. Bambang lanang (<i>Madhuca aspera</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 35. Sobsi (<i>Maesopsis eminii</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS) | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB) | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP) | per kg | 6% x harga patokan |

d. Kebun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|------------------------------|--------------------|
| d. Kebun Benih (KBS, KBK) | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP) | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 36. Manglid (<i>Manglietia glauca</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 37. Sawo, sawokecik (<i>Manikara sp.</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 38. Kayu putih (<i>Melaleuca cayuputi</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 39. Mindi (<i>Melia azedarach</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |

b. Areal . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 53 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|------------------------------|--------------------|
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 40. Cempaka (<i>Michelia champaca</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 41. Tanjung (<i>Mimusops elengi</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 42. Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |

43. Kayu . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 54 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---------------------------------|--------------------|
| 43. Kayu kuku (<i>Pericopsis mooniana</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 44. Tusam (<i>Pinus merkusii</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 45. Glodogan (<i>Polyalthia sp.</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 46. Jamuju (<i>Podocarpus imbricatus</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |

e. Kebun . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 55 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|------------------------------|--------------------|
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 47. Matoa (<i>Pometia pinnata</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP).. | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 48. Kayubawang (<i>Protium javanicum</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 49. Angsana (<i>Pterocarpus indicus</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 50. Bakau (<i>Rhizophora sp.</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |

c. Tegakkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 56 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|------------------------------|--------------------|
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 51. Trembesi (<i>Samanea saman</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 52. Cendana (<i>Santalum album</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 53. Puspa (<i>Schima walichii</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 54. Kesambi (<i>Shleichera oleosa</i>). | | |

a. Tegakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|------------------------------|--------------------|
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 55. Meranti (<i>Shorea sp.</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 56. Bogem (<i>Sonneratia alba</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 57. Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |

58. Jati . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 58 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|---------------------------------|--------------------|
| 58. Jati (<i>Tectona grandis</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 59. Ketapang (<i>Terminalia catapa</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 60. Suren (<i>Toona sp.</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 61. Gofasa (<i>Vitex cofassus</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |

e. Kebun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|------------------------------|--------------------|
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 62. Panggal buaya (<i>Zanthoxylum rethza</i>). | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| 63. Kaliandra putih (<i>Zapoteca tetragana</i>) | | |
| a. Tegakan Benih (TBT, TBS). | per kg | 6% x harga patokan |
| b. Areal Produksi Benih (APB). | per kg | 6% x harga patokan |
| c. Tegakkan Benih Provenan (TBP). | per kg | 6% x harga patokan |
| d. Kebun Benih (KBS, KBK). | per kg | 6% x harga patokan |
| e. Kebun Pangkas (KP). | per mata tunas atau per stek | Rp. 100,00 |
| XXVII. Jasa Laboratorium | | |
| A. Laboratotium Instrumentasi PUSTEKOLAH. | | |
| 1. Kadar Air. | per sampel | Rp. 20.000,00 |
| 2. Kadar Abu. | per sampel | Rp. 30.000,00 |
| 3. Kadar Silika. | per sampel | Rp. 40.000,00 |
| 4. Kadar Holoselulosa. | per sampel | Rp. 300.000,00 |
| 5. Kadar Alpha Selulosa. | per sampel | Rp. 300.000,00 |
| 6. Kadar Pentosan. | per sampel | Rp. 250.000,00 |
| 7. Kadar Liqnin. | per sampel | Rp. 250.000,00 |

8. Ekstraktif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|------------|----------------|
| 8. Ekstraktif dalam air dingin. | per sampel | Rp. 50.000,00 |
| 9. Ekstraktif dalam air panas. | per sampel | Rp. 60.000,00 |
| 10. Ekstraktif dalam NaOH 1%. | per sampel | Rp. 75.000,00 |
| 11. Ekstraktif dalam Alkohol – Benzena. | per sampel | Rp. 275.000,00 |
| 12. Derajat Keasaman (pH). | per sampel | Rp. 15.000,00 |
| 13. Berat jenis (BJ) / densitas. | per sampel | Rp. 25.000,00 |
| 14. Nilai kalor. | per sampel | Rp. 75.000,00 |
| 15. Kadar Zat terbang (volatile metter). | per sampel | Rp. 60.000,00 |
| 16. Kadar karbon terikat (Fixed carbon). | per sampel | Rp. 35.000,00 |
| 17. Daya serap terhadap Yodium (I ₂). | per sampel | Rp. 100.000,00 |
| 18. Daya serap terhadap Benzena (C ₆ H ₆). | per sampel | Rp. 90.000,00 |
| 19. Daya serap terhadap Khloroform (CHCl ₃). | per sampel | Rp. 80.000,00 |
| 20. Daya serap terhadap Formaldehida. | per sampel | Rp. 80.000,00 |
| 21. Daya serap terhadap Tetra Khlorokarbon (CCl ₄). | per sampel | Rp. 80.000,00 |
| 22. Daya serap terhadap Metilena biru. | per sampel | Rp. 120.000,00 |
| 23. Daya serap terhadap Asam Asetat (CH ₃ COOH). | per sampel | Rp. 75.000,00 |
| 24. Identifikasi komponen kimia. | per sampel | Rp. 400.000,00 |
| 25. Derajat Kristalinitas. | per sampel | Rp. 250.000,00 |
| 26. Mikro Fibril Angel. | per sampel | Rp. 250.000,00 |
| 27. PO (Preferd Orietation). | per sampel | Rp. 250.000,00 |
| 28. Analisis Jaringan/Komponen dengan Scanning Electron Microscop. | per sampel | Rp. 250.000,00 |
| 29. Analisis Komponen dengan EDX/EDS (energy Dispersive X-Ray). | per sampel | Rp. 200.000,00 |

30. Pembuatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 61 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|--------------------|------------------|
| 30. Pembuatan Arang (Skala lab)/Dest.Kering. | per sampel | Rp. 100.000,00 |
| 31. Pembuatan Arang Aktif (Skala Lab). | per sampel | Rp. 150.000,00 |
| 32. Kadar Pati. | per sampel | Rp. 100.000,00 |
| 33. Uji Bahan Pengawet CCB. | per sampel | Rp. 500.000,00 |
| 34. Identifikasi Kayu. | per sampel | Rp. 250.000,00 |
| B. LABORATORIUM MIKROBIOLOGI. | | |
| 1. Endomikoriza. | per kg | Rp. 50.000,00 |
| 2. Ektomokoriza. | per kg | Rp. 50.000,00 |
| 3. Inokulan gaharu. | per botol (600 ml) | Rp. 170.000,00 |
| 4. Bakteri PGPR (inokulan alqinate). | per liter | Rp. 200.000,00 |
| C. LABORATORIUM BIOTEKNOLOGI BBPB & PTH. | | |
| Analisis DNA. | | |
| 1. <i>Random Amplified Polymorphisms DNA (RAPD).</i> | per contoh | Rp. 100.000,00 |
| 2. <i>Sequence Characterized Amplified Regions (SCAR).</i> | per contoh | Rp. 70.000,00 |
| 3. Mikrosatelit. | per contoh | Rp. 150.000,00 |
| 4. <i>Polymerase Chain Reaction (PCR).</i> | per contoh | Rp. 125.000,00 |
| XXVIII. Produk Samping Hasil Penelitian | | |
| a. Benih Unggul Tanaman Kehutanan. | | |
| 1. Kayu Putih. | per gram | Rp. 150.000,00 |
| 2. <i>Eucalyptus pellita.</i> | per kg | Rp. 2.500.000,00 |
| 3. <i>Acacia mangium</i> F1. | per kg | Rp. 1.000.000,00 |
| 4. <i>Acacia mangium</i> F2. | per kg | Rp. 1.500.000,00 |

5. Sengon . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 62 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|--------------------------------------|----------------|
| 5. Sengon. | per kg | Rp. 750.000,00 |
| 6. Mahoni. | per kg | Rp. 500.000,00 |
| b. Bibit Unggul Tanaman Kehutanan. | | |
| 1. Acacia. | per Bibit | Rp. 3.000,00 |
| 2. Jati. | per Bibit | Rp. 7.500,00 |
| 3. Eucalyptus. | per Bibit | Rp. 2.500,00 |
| 4. Cendana. | per Bibit | Rp. 15.000,00 |
| 5. Meranti. | per Bibit | Rp. 2.500,00 |
| 6. Hopea. | per Bibit | Rp. 2.500,00 |
| 7. Ramin. | per Bibit | Rp. 2.500,00 |
| 8. Gaharu. | per Bibit | Rp. 5.000,00 |
| 9. Geronggang. | per Bibit | Rp. 2.500,00 |
| 10. Jabon. | per Bibit | Rp. 3.000,00 |
| 11. Binuang. | per Bibit | Rp. 2.500,00 |
| c. Kayu. | per log | |
| 1. Mangium (<i>Acacia mangium</i>); | per m ³ bahan baku serpih | Rp. 75.000,00 |
| 2. Mangium (<i>Acacia mangium</i>); | per m ³ per log | Rp. 200.000,00 |
| 3. Mahoni (<i>Swietenia marcophylla</i>); | per m ³ per log | Rp. 600.000,00 |
| 4. Pinus (<i>Pinus merkusii</i>); | per m ³ per log | Rp. 200.000,00 |
| 5. Sungkai (<i>Peronema canescens</i>); | per m ³ per log | Rp. 200.000,00 |
| 6. Puspa/Seru (<i>Schima wacii</i>); | per m ³ per log | Rp. 200.000,00 |
| 7. <i>Khaya sp</i> ; | per m ³ per log | Rp. 300.000,00 |
| 8. Meranti (<i>shorea sp</i>). | per m ³ per log | Rp. 400.000,00 |

d. Rusa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|----------------------|------------------|
| d. Rusa. | | |
| 1. Produk. | | |
| a. Rusa jantan (umur reproduksi > 2 tahun); | per ekor | Rp. 4.000.000,00 |
| b. Rusa betina (umur reproduksi > 2 tahun); | per ekor | Rp. 5.000.000,00 |
| c. Serbuk velvet; | per gram | Rp. 1.000,00 |
| d. Ranggah tua; | per pasang | Rp. 150.000,00 |
| e. Kompos padat rusa; | per kg | Rp. 1.500,00 |
| f. Kompos cair rusa. | per liter | Rp. 10.000,00 |
| 2. Jasa. | | |
| a. Penyewaan rusa untuk fotografi/sinematografi; | per ekor per jam | Rp. 100.000,00 |
| b. Penyewaan rusa untuk eksebisi. | per ekor per tahun | Rp. 2.500.000,00 |
| e. Lebah. | | |
| 1. Ratu lebah <i>Apis mellifera</i> . | per ekor | Rp. 50.000,00 |
| 2. Madu standar SNI 2004. | per botol per 600 ml | Rp. 50.000,00 |
| 3. Serbuk sari (Pollen). | per kg | Rp. 40.000,00 |
| 4. Royal Jelly. | per kg | Rp. 600.000,00 |
| f. Sutra. | | |
| 1. Alat pembersih floss kokon. | per unit | Rp. 185.000,00 |
| 2. Kokon. | per kg | Rp. 25.500,00 |
| 3. Ulat Sutera. | per box (25 rb ulat) | Rp. 93.500,00 |
| XXIX. Jasa Perpustakaan | | |
| 1. Publikasi elektronik. | | |
| Buku hasil penelitian bentuk CD/VCD. | per keping | Rp. 30.000,00 |

2. Buku . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 64 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 2. Buku katalog hasil litbang berbahasa indonesia (full colour). | | |
| a. Ukuran A5 (s/d 50 halaman); | per buku | Rp. 25.000,00 |
| b. Ukuran A5 (51 s/d 100 halaman). | per buku | Rp. 50.000,00 |
| 3. Buku katalog hasil litbang berbahasa inggris (full colour). | per buku | |
| a. Ukuran A5 (s/d 50 halaman); | per buku | Rp. 35.000,00 |
| b. Ukuran A5 (51 s/d 100 halaman). | per buku | Rp. 55.000,00 |
| 4. Buku Semi Populer. | per buku | Rp. 100.000,00 |
| 5. Atlas Rotan. | per buku | Rp. 150.000,00 |
| 6. Atlas Kayu. | per buku | Rp. 250.000,00 |
| 7. Atlas Benih. | per buku | Rp. 50.000,00 |
| XXX. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana yang Terkait dengan Tugas dan Fungsi | | |
| A. Aula kapasitas 150 – 200 orang. | | |
| 1. Aula BDK Bogor, BDK Samarinda, BDK Makassar, BDK Pematang Siantar, BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka, BDK Pekanbaru dan Pusdiklat Kehutanan. | 1 x pakai 8 jam kelebihan per jam | Rp. 1.000.000,00 Rp. 100.000,00 |
| 2. BDK Kupang dan BLK Manokwari. | 1 x pakai 8 jam kelebihan per jam | Rp. 500.000,00 Rp. 50.000,00 |
| B. Kamar dengan AC kapasitas 3 tempat tidur. | | |
| 1. Pusdiklat Kehutanan, BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka. | per kamar per hari | Rp. 150.000,00 |
| 2. BDK Bogor, BDK Pematang Siantar, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang, dan BLK Manokwari. | per kamar per hari | Rp. 125.000,00 |
| C. Kamar dengan kipas angin kapasitas 3 tempat tidur. | | |
| BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka, BDK Bogor, BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari. | per kamar per hari | Rp. 75.000,00 |

D. Kamar . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 65 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|---------------------|----------------|
| D. Kamar Mess Non AC kapasitas 2 tempat tidur. BDK Bogor, BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka, BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari. | per kamar per hari | Rp. 50.000,00 |
| E. Kamar Mess dengan AC kapasitas 2 tempat tidur. BDK Bogor, BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka, BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari. | per kamar per hari | Rp. 100.000,00 |
| F. Ruang Kelas kapasitas 20 orang ber AC, papan tulis. | | |
| 1. Pusklat Kehutanan. | per kelas per 8 jam | Rp. 300.000,00 |
| | kelebihan per jam | Rp. 30.000,00 |
| 2. BDK Bogor, BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka, BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari. | per kelas per 8 jam | Rp. 200.000,00 |
| | kelebihan per jam | Rp. 20.000,00 |
| G. Ruang kelas kapasitas 30 orang, AC, papan tulis. | | |
| 1. Pusklat Kehutanan. | per kelas per 8 jam | Rp. 450.000,00 |
| | kelebihan per jam | Rp. 45.000,00 |
| 2. BDK Bogor, BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka, BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari. | per kelas per 8 jam | Rp. 250.000,00 |
| | kelebihan per jam | Rp. 25.000,00 |
| H. Ruang kelas kapasitas > 40 Orang, AC, papan tulis. | | |
| 1. BDK Bogor, Pusklat Kehutanan. | per kelas per 8 jam | Rp. 400.000,00 |
| | kelebihan per jam | Rp. 40.000,00 |
| 2. BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka, BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari. | per kelas per 8 jam | Rp. 300.000,00 |
| | kelebihan per jam | Rp. 30.000,00 |
| I. Ruang kelas kapasitas > 40 Orang, kipas angin, papan tulis. | | |

BDK . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 66 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---------------------------|------------------|
| BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka, BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari. | 1 x pakai 8 jam | Rp. 150.000,00 |
| | kelebihan per jam | Rp. 15.000,00 |
| J. Ruang rapat dengan AC, kapasitas 20 orang. | | |
| BDK Bogor, BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka, BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari. | 1 x pakai 8 jam | Rp. 150.000,00 |
| | kelebihan per jam | Rp. 15.000,00 |
| K. Ruang rapat dengan AC kapasitas 30 Orang. | | |
| Pusdiklat Kehutanan. | 1 x pakai 8 jam | Rp. 300.000,00 |
| | kelebihan per jam | Rp. 30.000,00 |
| L. Laboratorium Bahasa Inggris kapasitas 20 orang. | per kelas per jam | Rp. 150.000,00 |
| M. Laboratorium komputer, AC, kapasitas 10 orang. | per lab per jam | Rp. 100.000,00 |
| N. Tempat perkemahan (<i>Camping ground</i>), kapasitas 30 orang. | per hari | Rp. 200.000,00 |
| O. Tempat perkemahan (<i>Camping ground</i>), kapasitas 100 orang. | per hari | Rp. 500.000,00 |
| XXXI. Jasa Lainnya | | |
| 1. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus. | | |
| a. Penggunaan untuk Keperluan <i>Shooting</i> ; | per hari | Rp. 1.750.000,00 |
| b. Pemotretan; | per hari | Rp. 125.000,00 |
| c. Bibit Tanaman; | per bibit | Rp. 2.500,00 |
| d. Penggunaan untuk <i>Camping Ground</i> . | per 10-100 orang per hari | Rp. 175.000,00 |
| 2. Lain-lain. | | |
| a. Identifikasi Herbarium; | per sampel | Rp. 75.000,00 |
| b. Penggambaran Specimen Pohon; | per sampel | Rp. 100.000,00 |

c. Penggambaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|--------------------|------------------|
| c. Penggambaran Specimen Palmae; | per sampel | Rp. 190.000,00 |
| d. Peta Perwilayahan Jenis Andalan; | per sampel | Rp. 85.000,00 |
| e. Jasa Pelaksanaan Riset (<i>Fee</i>); | per topik | Rp. 5.000.000,00 |
| f. Jasa Alih Teknologi; | per orang per hari | Rp. 80.000,00 |
| g. Jasa Analisis GIS; | per <i>scane</i> | Rp. 65.000,00 |
| h. Jasa Penyediaan data dan Informasi; | per set | Rp. 35.500,00 |
| i. Buku dan Jurnal; | per buku | Rp. 75.000,00 |
| j. Jasa Konsultasi. | per topic per hari | Rp. 50.000,00 |
| 3. Jasa Pengujian Benih Tanaman Kehutanan. | | |
| a. Uji kemurnian benih; | | |
| 1) Benih halus; | per sampel | Rp. 75.000,00 |
| 2) Benih kecil; | per sampel | Rp. 65.000,00 |
| 3) Benih sedang; | per sampel | Rp. 55.000,00 |
| 4) Benih besar. | per sampel | Rp. 45.000,00 |
| b. Uji daya kecambah secara langsung; | | |
| 1) Rumah kaca; | per sampel | Rp. 93.000,00 |
| 2) Laboratorium. | per sampel | Rp. 70.000,00 |
| c. Uji daya kecambah secara tidak langsung; | | |
| 1) Tetrazolium; | per sampel | Rp. 250.000,00 |
| 2) Hidrogen Peroxida. | per sampel | Rp. 150.000,00 |
| d. Uji kadar air; | per sampel | Rp. 30.000,00 |
| e. Uji berat 1000 butir benih. | | |
| 1) Benih halus; | per sampel | Rp. 75.000,00 |
| 2) Benih kecil; | per sampel | Rp. 65.000,00 |

3) Benih . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| 3) Benih sedang; | per sampel | Rp. 55.000,00 |
| 4) Benih besar. | per sampel | Rp. 55.000,00 |
| f. Identifikasi hama penyakit benih. | | |
| 1) Cendawan; | per sampel | Rp. 150.000,00 |
| 2) Serangga. | per sampel | Rp. 130.000,00 |
| 4. Pengujian Bibit Tanaman Hutan. | | |
| a. Serangan hama dan penyakit bibit; | per sampel | Rp. 5.000,00 |
| b. Kekompakan media; | per sampel | Rp. 5.000,00 |
| c. Warna daun; | per sampel | Rp. 5.000,00 |
| d. Deformasi batang; | per sampel | Rp. 5.000,00 |
| e. Sistim perakaran; | per sampel | Rp. 5.000,00 |
| f. Tinggi bibit; | per sampel | Rp. 5.000,00 |
| g. Diameter batang; | per sampel | Rp. 3.000,00 |
| h. Batang berkayu; | per sampel | Rp. 2.000,00 |
| i. Indeks mutu bibit; | per sampel | Rp. 30.000,00 |
| j. Identifikasi hama penyakit bibit. | | |
| 1) Cendawan; | per sampel | Rp. 150.000,00 |
| 2) Serangga. | per sampel | Rp. 130.000,00 |
| 3) Uji fenologi (tunas generative) | per sampel | Rp. 50.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

Silvana Djaman

